

Analisis Penerapan Aktivitas Pengendalian SIA terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara

Dameria Naibaho^{1*}, Bernadetta Anita Jerry Simbolon², Ratna³,
Darmawati Simanjuntak⁴, Agus Mariani Saragih⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
damerianaibaho@polmed.ac.id

Abstract

This research aims to determine the application of control activities from the accounting information system at the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service with control activities according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO). The data collected through interviews is primary data such as documents and sections involved in finance and implementation of information systems and control activities at the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service. The data collected was analyzed descriptively by comparing control activities at the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service with control activities according to COSO. The results obtained indicate that the control activities at the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service are in accordance with and fulfill the control activities according to COSO. Thus, the accounting information system at the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service is appropriate and running well with respect to financial performance. However, it is necessary to provide training to employees or honorary employees in the agency so that they can improve their skills and accuracy in working so that their performance is more effective in accordance with the procedures for operational activities in the North Sumatra Province Maritime and Fisheries Service.

Keywords: Control Activities, Accounting Information Systems, Financial Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aktivitas pengendalian dari sistem informasi akuntansi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan aktivitas pengendalian menurut *Committee of Sponsoring Organization* (COSO). Data yang dikumpulkan melalui wawancara merupakan data primer seperti dokumen dan bagian yang terlibat dalam keuangan dan penerapan sistem informasi serta aktivitas pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan di analisis secara deskriptif dengan cara membandingkan aktivitas pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan aktivitas pengendalian menurut COSO. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dan memenuhi aktivitas pengendalian menurut COSO, Dengan demikian bahwa sistem informasi akuntansi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dan berjalan dengan baik terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi perlu diberikan pelatihan kepada para pegawai atau honorer dalam instansi agar lebih dapat meningkatkan keterampilan dan ketelitian dalam bekerja agar kinerja lebih efektif sesuai dengan prosedur atas kegiatan operasional yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi organisasi khususnya pengolahan data, dengan sistem komputer menggantikan sistem manual sebagai alat pengolahan data. Salah satu sistem yang digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya adalah sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem informasi akuntansi dianggap sebagai salah satu sistem informasi penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Alat yang tepat untuk menjaganya yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, menjaga aset dan mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen, dan membentuk sistem pengendalian internal terhadap fungsi fungsi manajemen merupakan perhatian yang utama (Soemarso, 2010:11).

Perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik adalah perusahaan yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, dan sumber daya yang memadai (Anastasia dan Lilis, 2010:82). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Sistem pengendalian internal bukanlah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk menghindari semua kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan yang terjadi. Sistem pengendalian internal yang baik adalah dimana sebuah perusahaan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada sistem manajemen dan keuangan yang baik pula akan menciptakan aktivitas dalam perusahaan menjadi lancar dan terkendali. Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* terdapat lima komponen antara lain: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan, yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Sistem informasi akuntansi merupakan integrasi dari berbagai komponen fisik dan non fisik yang saling berhubungan secara harmonis yang bertujuan untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pengguna dalam proses pengambilan keputusan (Azhar, 2017:80).

Kinerja adalah gambaran mengenai kemampuan atau tingkat pencapaian perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah tertuang dalam strategic planning perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keuangan suatu perusahaan yang melakukan analisis dengan alat analisis keuangan, sehingga mampu mengetahui tentang yang baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang merupakan cerminan prestasi kerja (Arifin & Marlius, 2017). Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Implementasi sistem informasi akuntansi yang efektif serta efisien akan berdampak pada kualitas informasi keuangan dan non-keuangan yang dihasilkan yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Beberapa hal tersebut merujuk pada manfaat SIA terhadap efektivitas perencanaan, pengendalian, analisis, pengambilan keputusan, penyajian laporan keuangan, sehingga SIA sangat bermanfaat untuk efektivitas kinerja keuangan serta kinerja manajemen yang pada akhirnya akan menunjukkan kinerja organisasi secara keseluruhan. sistem informasi akuntansi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi baik dalam performa non-keuangan maupun performa keuangan. Peningkatan kinerja keuangan maupun non-keuangan dapat dipengaruhi oleh implementasi sistem informasi akuntansi yang diukur melalui kepuasan pengguna atas beragam informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar perancangan, pengelolaan serta pembuatan keputusan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Instansi ini memiliki tugas utama dalam mengembangkan, mengawasi, dan mengelola sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

keberlanjutan lingkungan, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan mereka meliputi pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, penyuluhan kepada nelayan dan petani ikan, serta pengembangan industri berbasis perikanan. Memantau dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah Sumatera Utara, termasuk pengaturan terkait izin penangkapan, penggunaan alat tangkap, dan pengelolaan zona penangkapan. Mendorong pengembangan budidaya ikan dan komoditas perikanan lainnya di Sumatera Utara, baik dalam skala kecil maupun besar, serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada nelayan dan petani ikan. Melakukan upaya untuk melindungi sumber daya laut yang penting seperti terumbu karang dan habitat penting lainnya, serta mengambil langkah-langkah konservasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena yang terjadi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya kesalahan pencatatan keuangan dikarenakan banyaknya jumlah dokumen dan catatan terkait suatu transaksi atau pun aktivitas yang berbeda beda, sehingga menyebabkan kekeliruan pada saat proses pencatatan dilakukan. Hal ini dapat memicu terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan catatan dan dokumen apabila tidak diantisipasi dengan suatu penerapan aktivitas pengendalian yang baik untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan menunjang kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena diatas penerapan aktivitas pengendalian dari sistem informasi akuntansi berperan penting bagi instansi pemerintahan dalam memberikan pengendalian terhadap sistem informasi akuntansi dan mengantisipasi terjadinya kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui apakah aktivitas pengendalian pada sistem informasi akuntansi sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Aktivitas Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Azhar (2017) menyebutkan bahwa SIA meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan organisasi. Pengendalian internal, seperti yang dijelaskan oleh COSO, memiliki lima elemen utama, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Elemen-elemen ini memastikan operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian terdahulu, seperti oleh Lestari (2018) dan Manesanulu (2022), menunjukkan bahwa penerapan SIA yang baik berdampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan organisasi. Kinerja keuangan sendiri merupakan gambaran kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan finansial melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Pengukuran kinerja keuangan biasanya melibatkan analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan.

METODE

Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sei Batu Ginggaing No.6, Medan Baru, Kota Medan. Penelitian dilaksanakan mulai Desember 2023 hingga Agustus 2024. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan kepala keuangan dan staf terkait di instansi tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi terkait otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dokumentasi, pengendalian fisik aset, dan pemeriksaan kinerja. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait transaksi keuangan, seperti bukti pembayaran, kuitansi, dan laporan keuangan. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran pajak, dokumen perjalanan dinas, dan dokumen lainnya terkait aktivitas pengendalian. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan implementasi aktivitas pengendalian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan standar COSO. Analisis ini bertujuan menilai kesesuaian penerapan sistem pengendalian dengan standar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan.

Tabel 1 Otorisasi yang Tepat atas Transaksi dan Aktivitas

Teori	Penerapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Otorisasi adalah proses memberikan izin atau persetujuan kepada individu atau sistem untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks transaksi dan aktivitas organisasi, otorisasi berarti bahwa tindakan tersebut harus disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk memberikan persetujuan. Adapun tujuan dari otorisasi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyalahgunaan 2. Memastikan akurasi dan keandalan 3. Mengurangi risiko 	Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara terdapat pengendalian atas setiap transaksi dan aktivitas salah satunya yaitu penentuan wewenang atau orang yang bertanggung jawab yang mengatur proses persetujuan transaksi atau suatu kegiatan yaitu kepada kepala bidang masing masing terkait. Bagian yang berwenang melakukan otorisasi untuk menyetujui transaksi keuangan misalnya pembayaran penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas adalah kepala dinas kemudian kepala bidang terkait penggunaan anggaran dan bendahara pengeluaran. Otorisasi transaksi dan aktivitas dilakukan dengan menandatangani dokumen pendukung oleh kepala dinas, kepala bidang, dan bendahara pengeluaran sebagai bukti sah, serta dapat melakukan proses pembayaran perjalanan dinas.

Sumber: Data diolah (2024)

Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas merupakan proses pengesahan atau persetujuan yang dilakukan pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu transaksi atau aktivitas

dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Jika setiap orang dalam suatu organisasi bisa memperoleh atau menggunakan aktiva seenaknya, hal itu akan menimbulkan kekacauan. Jika perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik, maka diperlukan otorisasi yang tepat atas setiap transaksi yang terjadi agar transaksi tersebut dinilai sah atau valid. Otorisasi bersifat umum dan khusus, otorisasi umum adalah manajemen menetapkan kebijakan, dan para bawahan diinstruksikan untuk mengimplementasikan otorisasi umum tersebut dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan itu. Otorisasi khusus berlaku untuk transaksi individual. Untuk transaksi tertentu, manajemen memilih mengotorisasi setiap transaksi. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara penggunaan wewenang yang tepat dalam persetujuan suatu transaksi atau aktivitas yang terjadi di lingkungan dinas kelautan dan perikanan sudah berjalan dengan baik dan telah diatur dalam prosedur, persetujuan suatu kegiatan atau yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yang dimana setiap terlaksananya suatu kegiatan atau transaksi dalam dinas kelautan dan perikanan harus ada persetujuan dari pimpinan dinas dan kepala bidang terkait. Dengan demikian, otorisasi atas transaksi dan aktivitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh COSO dalam aktivitas pengendalian.

Tabel 1. Pemisahan Tugas yang Memadai

Teori	Penerapan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
<p>Pemisahan tugas yang memadai adalah konsep pengendalian internal yang bertujuan untuk membagi tanggung jawab di antara beberapa individu dalam suatu organisasi. Adapun empat pedoman umum menyangkut pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah baik kecurangan maupun kekeliruan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. 2. Pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpan aset terkait. 3. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan 4. Pemisahan tugas TI dari departemen pemakai. 	<p>Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah ditugaskan sesuai dengan struktur tugas yang telah dibagi berdasarkan fungsinya masing masing. Hal ini dilakukan agar pemisahan tugas antar pegawai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Beberapa struktur fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yaitu:</p> <p>Fungsi Keuangan Bagian Departemen Keuangan bertanggung jawab dalam hal Menyusun dan mengelola serta mengawasi anggaran tahunan, Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, Melakukan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Adapun Pembagian tugas pada Departemen keuangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Keuangan Kepala bagian keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dalam Menyusun dan mengelola anggaran dinas sesuai peraturan yang berlaku, Memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan tepat waktu.

Teori	Penerapan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
	<p>2. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera utara bertanggung jawab untuk Melakukan pengelolaan penerimaan dana yang masuk ke dinas, Melakukan pencatatan semua penerimaan keuangan dengan rinci dan akurat, Melakukan penyetoran pendapatan yang diterima ke kas daerah atau rekening yang ditentukan, Melakukan penyusunan laporan penerimaan keuangan secara periodik, Melakukan pengarsipan bukti penerimaan dan dokumen terkait lainnya untuk di audit dan pemeriksaan.</p> <p>1. Analisis Laporan Keuangan Analisis Laporan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk Melakukan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dinas, Membantu dalam menyusun rencana anggaran tahunan berdasarkan analisis data keuangan, Melakukan pemantauan realisasi anggaran untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana, Melakukan identifikasi dan menyarankan solusi untuk masalah keuangan yang muncul, Melakukan penyusunan laporan analisis keuangan untuk manajemen dan pihak terkait.</p> <p>2. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk Melakukan pengelolaan kas pengeluaran untuk keperluan dinas, Melakukan pemrosesan dan membayar tagihan atau kewajiban dinas sesuai prosedur, Melakukan pencatatan semua pengeluaran dengan akurat dan tepat waktu, Melakukan pembayaran atas belanja dinas sesuai anggaran yang telah disetujui, Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung sebelum melakukan pembayaran, Menyusun laporan keuangan secara periodik dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan dinas.</p> <p>3. Pengadministrasian Keuangan Pengadministrasian Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk Melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan, membantu dalam penyusunan anggaran untuk kegiatan dinas berdasarkan kebutuhan dinas, Melakukan pengelolaan arsip dokumen keuangan dan administrasi untuk memastikan kelanaran audit dan pemantauan, Melakukan proses administrasi untuk</p>

Teori	Penerapan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
	<p>transaksi keuangan, termasuk pembayaran, pengajuan anggaran, dan pelaporan.</p> <p>4. Penata Laporan Keuangan Penata laporan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk berperan dalam penyusunan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kegiatan operasional dan proyek dinas, bertanggung jawab dalam pengelolaan kas dinas termasuk dalam pemantauan dan pencatatan masuk dan keluarnya dana secara akurat, Melakukan penyusunan laporan keuangan rutin dan menyampaikannya kepada pimpinan dinas terkait untuk evaluasi dan pertanggungjawaban, Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan, Melakukan pemberian saran dan konsultasi kepada pimpinan dinas dalam hal perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis.</p> <p>5. Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mencatat semua penerimaan yang masuk, termasuk pembayaran dari pihak yang berhubungan dengan layanan dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, Membuat laporan keuangan yang terkait dengan penerimaan dan memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, Menyimpan uang tunai (Kas) dan dokumen keuangan dengan aman serta memastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana, Melakukan rekonsiliasi antara catatan keuangan internal dengan laporan bank dan dokumen lainnya untuk memastikan akurasi data keuangan.</p>

Sumber: Data diolah (2024)

Ketika memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian, manajemen harus mempertimbangkan apakah tugas dibagi atau dipisahkan di antara orang-orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak tepat atau curang. Pemisahan tugas merupakan hal mendasar dalam memitigasi risiko penipuan karena hal ini mengurangi, namun tidak sepenuhnya mencegah, kemungkinan seseorang bertindak sendiri. Selain itu, pemisahan tugas mengurangi kesalahan dengan memiliki lebih dari satu orang yang melakukan atau meninjau transaksi dalam suatu proses, sehingga meningkatkan kemungkinan ditemukannya kesalahan. Dalam konteks keuangan, seseorang yang menangani pembayaran tidak boleh juga yang mengotorisasi pembayaran tersebut. Misalnya, departemen yang memproses faktur untuk pembayaran tidak boleh juga yang memiliki kewenangan untuk menandatangani cek atau melakukan transfer uang. Hal ini untuk memastikan bahwa ada

pengawasan yang memadai terhadap pengeluaran dan mengurangi risiko terjadinya penipuan. Penerapan pemisahan tugas memerlukan pemahaman yang baik tentang proses dan risiko terkait, serta penetapan prosedur yang jelas. Organisasi perlu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur ini diikuti dengan ketat untuk menjaga integritas dan keamanan operasional.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara proses struktur organisasi memisahkan tugas dan tanggung jawab tiap masing masing bagian pada struktur organisasi yang dimana masing masing bagian tersebut sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dimana bagian bagian ini bertanggung jawab kepada kepala bidangnya masing masing terhadap aktivitas yang dilakukan oleh staf. Pemisahan tugas ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dinas serta untuk tercapaian tujuan dan sasaran dari instansi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah terdapat pemisahan tugas dimana tiap tugas yang diberikan kepada tiap staf atau kepala departemen berbeda beda sesuai dengan prosedur yang berlaku serta aktivitas yang diperlukan oleh tiap bidangnya masing masing. Maka dari itu pemisahan tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan baik dan sesuai dengan teori aktivitas pengendalian menurut COSO.

Tabel 2. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Teori	Penerapan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipranomori secara berurutan untuk memudahkan pengendalian atas dokumen yang hilang dan sebagai alat bantu untuk mencari dokumen itu ketika diperlukan di kemudian hari. 2. Disiapkan pada waktu transaksi berlangsung, atau segera mungkin, untuk meminimalkan kesalahan penetapan waktu. 3. Dirancang untuk berbagai penggunaan, jika mungkin, guna meminimalkan jumlah formulir yang berbeda. 4. Dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyiapan yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek secara internal formulir dan catatan itu. 	<p>Dokumen dan catatan yang digunakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah memadai karena semua dokumen dan catatan pada dokumen yang berkaitan dengan keuangan telah diberikan nomor urut (pranomori), sudah lengkap dan disimpan dengan rapi di dalam lemari arsip. Hal ini memudahkan dalam pengambilan dokumen yang diperlukan terkait dokumen keuangan jika dibutuhkan di masa yang akan datang. Dokumen dan catatan tersebut juga telah terkomputerisasi dan telah di otorisasi oleh pihak pihak yang berwenang, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah.</p>

Sumber: Data diolah (2024)

Dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aset dengan benar. Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menerapkan prinsip ini dengan memberikan nomor urut (pranomori) pada setiap dokumen dan catatan yang ada pada instansi dan telah terkomputerisasi serta disimpan dengan rapi dalam lemari arsip sesuai dengan urutan tahun dokumen. Hal ini dilakukan sebagai pengendalian atas dokumen yang hilang dan sebagai alat bantu untuk mencari dokumen tersebut ketika diperlukan di kemudian hari. Dokumen dan catatan disiapkan apabila terjadi sebuah transaksi yang terjadi untuk menjadi bukti terjadinya sebuah aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan kecurangan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh dinas untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional dinas dan

dirancang bagi pemangku kepentingan yang berwenang untuk mengelola dan pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan. Kemudian dokumen tersebut dibuat dengan sedemikian rupa untuk memudahkan pihak yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen tersebut dengan benar. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara detail terkait dokumen dan catatan yang dibutuhkan suatu waktu untuk membuat sebuah laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa dokumen dan catatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sudah memadai dan diterapkan dengan baik dan sesuai dengan teori aktivitas pengendalian menurut COSO.

Tabel 3. Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan

Teori	Penerapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Pengendalian internal yang memadai, aset dan catatan harus dilindungi. Jika dibiarkan tidak terlindungi, aset dan catatan itu bisa dicuri. Jika tidak dilindungi secara memadai, catatan bisa di curi, rusak, atau hilang, yang dapat sangat mengganggu proses akuntansi dan operasi organisasi.	Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan pembatasan terhadap aset dan catatan catatan yang terkait dengan keuangan, yang dimana data aset dan catatan catatan keuangan hanya dikelola oleh orang atau departemen keuangan atau yang berkepentingan untuk mengelolanya diluar dari departemen yang ditentukan oleh kebijakan dinas tidak bisa mencampur tangani terkait catatan yang berhubungan dengan aset. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dokumen dan data yang berkaitan dengan aset dinas. Semua catatan keuangan disimpan dengan baik melalui komputerisasi dan disimpan dalam lemari arsip yang tersusun rapi berdasarkan tahun pembuatan dokumen. Untuk mengantisipasi pencurian dokumen dan surat surat berharga lainnya.

Sumber: Dokumen diolah (2024)

Pengendalian fisik atas catatan dan aset merupakan hal penting untuk dilindungi. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pencurian, perusakan dan penyalahgunaan aset. Pengendalian fisik atas aset dan catatan adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk melindungi aset berharga, seperti uang tunai, inventaris, peralatan, dan dokumen penting, serta untuk memastikan keakuratan catatan keuangan dan informasi. Adapun pengendalian fisik atas aset dan catatan yang dapat dilakukan adalah keamanan aset menggunakan langkah-langkah fisik seperti kunci, kamera pengawas, sistem alarm, dan penjaga keamanan untuk melindungi aset dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Pemeliharaan aset dengan memastikan bahwa aset dalam kondisi baik dan tidak rusak, Ini termasuk pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pemeriksaan berkala. Inventaris dan pelacakan menggunakan sistem untuk mencatat dan melacak aset yang dimiliki organisasi, seperti dengan nomor seri atau kode batang, untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan benar dan tidak hilang. Pengamanan catatan dengan menyimpan catatan penting, seperti catatan keuangan, kontrak, dan dokumen legal, ditempat yang aman seperti brankas atau lemari arsip yang terkunci. Akses terbatas dengan

membatasi akses ke catatan hanya kepada orang-orang yang berwenang, ini bisa dilakukan dengan penggunaan kata sandi atau kunci akses. Penyimpanan digital menggunakan backup digital dan penyimpanan awan untuk melindungi data dari kerusakan fisik atau kehilangan. Selain itu enkripsi dan kontrol akses juga penting untuk melindungi data digital. Pengelolaan arsip mengatur dan mengelola catatan dengan baik, termasuk menentukan jangka waktu penyimpanan dan kebijakan pemusnahan catatan yang tidak lagi diperlukan. Pengendalian fisik yang efektif membantu organisasi mencegah kerugian finansial, melindungi informasi rahasia, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pengendalian aset dan catatan dikelola oleh sendiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera melalui divisi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya agar tidak terjadi pencurian atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Catatan-catatan tersebut disimpan dengan baik melalui komputerisasi dan disimpan pada lemari arsip dengan rapi dan dilakukan backup kedalam sebuah data digital untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan fisik atas data aset dan catatan yang penting untuk proses operasional dinas.

Tabel 4. Pemeriksaan Independen terhadap Kinerja

Teori	Penerapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Kebutuhan akan pemeriksaan independen timbul karena pengendalian cenderung berubah seiring dengan berlalunya waktu, kecuali review sering dilakukan. Personil mungkin telah melupakan atau sengaja tidak mengikuti prosedur, atau mereka mungkin ceroboh kecuali ada yang mengamati dan mengevaluasi kinerjanya.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memiliki enam bidang yang berbeda, yaitu Bidang Keuangan, Bidang Umum, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, Bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap bidang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, sehingga atasan bidang masing-masing dapat melakukan pengecekan kinerja staf secara independen sesuai dengan bidangnya. Untuk bidang keuangan terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan pemeriksaan keuangan daerah yang dimana pada waktu tertentu dilakukan pemeriksaan untuk melihat kinerja keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh dinas dan menilai sejauh mana proses operasional berdampak terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengendalian fisik atas catatan dan aset yang telah dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik untuk menjaga aset dan catatan serta mengantisipasi terjadinya kehilangan,

kerusakan dan pencurian dan telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori aktivitas pengendalian COSO.

Pemeriksaan independen terhadap kinerja merupakan pengendalian yang penting dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan terhadap tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan atas kerja dilakukan agar berjalan sesuai tujuan dan efektif sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan independen terhadap kinerja adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal, Pemeriksaan independen terhadap kinerja juga dikenal sebagai audit kinerja atau audit operasional, adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan suatu organisasi atau entitas terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan independen terhadap kinerja, sering disebut sebagai audit kerja, adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal atau internal yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang diaudit.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif tentang bagaimana sumber daya dikelola, apakah tujuan organisasi tercapai, dan apakah ada area yang dapat diperbaiki. Auditor independen yang melakukan pemeriksaan ini tidak memiliki kepentingan atau hubungan dengan entitas yang diaudit, sehingga memberikan jaminan atas ketidakberpihakan dan obyektivitas dalam hasil pemeriksaan. Tujuan utamanya untuk menilai efektivitas, Mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai audit ini menilai apakah program kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan yang diinginkan. Menilai penggunaan sumber daya yang ada seperti waktu, tenaga, dan uang secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengevaluasi apakah sumber daya diperoleh dengan cara hemat biaya. Audit ini memastikan bahwa organisasi mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang dihabiskan.

Pemeriksaan ini sering dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Hasil dari audit kinerja ini dapat digunakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan operasi, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan memastikan bahwa sumber yang digunakan dengan cara yang paling produktif.

Pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap kinerja bawahan dan setiap staf memberikan informasi kepada atasannya masing-masing terkait kinerja yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga berjalannya prosedur dan kegiatan operasional yang telah ditentukan serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab maka dari itu setiap kepala bidang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan dipantau langsung oleh masing masing kepala bidang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk bagian bidang keuangan terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan pemeriksaan keuangan daerah pada waktu tertentu yang dimana hal ini dilakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi keuangan instansi dan menilai risiko terjadinya penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh kantor dinas serta untuk menilai kinerja yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh instansi dalam melakukan proses operasionalnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa aktivitas pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam aktivitas pengendalian COSO. Akan tetapi perlu diberikan pelatihan kepada tiap pegawai atau staf yang berstatus honor yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara untuk lebih memahami prosedur kerja, untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan atas kinerja yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aktivitas pengendalian dari sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan dengan membandingkan aktivitas pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai aktivitas pengendalian menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*). Bahwa sistem informasi akuntansi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan penerapan yang diharapkan dan berjalan dengan baik terhadap kinerja keuangan karena adanya otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pemisahan tugas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan dan pemeriksaan atas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. Z., & Marlius, D. 2017. Analisis Kinerja Keuangan PT. Pegadaian Cabang Ulak Karang.
- Asbar, Y. and M. A. Saptari 2017. "Analisa Dalam Mengukur Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode PIECES." JURNAL VISIONER & STRATEGIS Vol. 6, No. 2.
- Astuti, M. 2019. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Azhar, Susanto, 2017, Sistem Informasi Akuntansi (Pemahaman konsep secara terpadu) Edisi Kesatu, Bandung: Lingga Jaya.
- Bodnar, G., & Hopwood, W.S. 2012. *Accounting information systems* (edisi ke-11). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Estorina, Endang. 2020. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Kas pada PT PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Makassar*. Skripsi: Makassar. Universitas Bosowa.
- Francis Hutabarat, M. B. A. 2021. *Analisis kinerja keuangan perusahaan*. Desanta Publisher.
- Hasibuan, S. W., Abdurrahman Misno, M. E. I., Ansri Jayanti, S. S., Sholahuddin, M., Mubarrok, U.S., Wahab, A., ... & Baso Iping, S.E. 2021. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis. Media Sains Indonesia*.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ro5eDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=siklus+informasi&ots=WehhN2jTe&sig=5DFdJoZdE7VeyvyGSvANhnnZTpQ&redir_esc=y#v=onepage&q=siklus%20informasi&f=true
- <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>
- <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Karim, F. K. J., & Novita. 2022. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dengan Coso Integrated Framework. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 195–210.

<https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.33312https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/33312/16033/>

- Kasmir. 2020. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 192 – 197.
- Lestari, W., Alvina, Y., Fatika, CS, & RIza, A. 2023. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Menggunakan Metode PIECES. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12 (2), 153-164.
- Meiryani. 2020. Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi (Winasari & Euis (eds.); 1st ed.).
- Mayhera, T., et al. 2021. “Evaluasi Sistem Laporan Keuangan Pada Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Menggunakan Metode Pieces.” *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas* Vol. 6, No. 1.
- Naibaho, D., Sipayung, F., Ratna, R., Bangun, R., & Simanjuntak, D. 2023. Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2017-2022). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3328-3341.
- Nistrina, K., & Rahmania, A. 2021. Sistem Informasi Point of Sale Berbasis Website
- Novita, S., Habib, A., & Hasibuan, R. P. S. 2022. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kecambah Kelapa Sawit Pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 423–433. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/884>
- Simamora, L., Muhammad, M., & Napitupulu, I. H. 2022. Pengaruh Ukuran dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat. *Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun*, 3(1), 1–8.
- Soemarso, S.R. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Studi Kasus: Pt Barokah Kreasi Solusindo (Artpedia). *Jurnal Sistem Informasi, JSIKA*, 03(02).
- Sutabri, T. 2012. Analisis sistem informasi. Penerbit Andi.
- Sujarweni, V. W. 2017. Analisis Laporan Keuangan: teori, aplikasi, dan hasil penelitian/V. Wiratna Sujarweni.
- Syahrman, S. 2020. Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mengambil Keputusan Manajemen Pada Pt Walet Solusindo. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 185-192.
- Tahir, I., Mas’ud, M., & Plyriadi, A. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Bisnis*, 93(1), 66–74.
- Tukino. 2020. Rancang Bangun Sistem Informasi *E-Marketing* pada PT Pulau Cahaya Terang. *Computer Based Information System Journal*, 08(01), 25–33.
- Puspitawati, L. 2021. Sistem Informasi Akuntansi: Kualitas dan Faktor Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi.
- Zainal, I., & Marlius, D. 2016. *PT. Pegadaian Cabang Ulak Karang*. 1–10.